

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu upaya dari pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat serta upaya untuk mengatur segala sesuatu yang ada di masyarakat. Kebijakan sendiri diangkat dari keresahan masyarakat setelah itu dikaji untuk disusun menjadi kebijakan, kebijakan publik yakni hal hal berkaitan dengan urusan pemerintahan dan masyarakat sehingga kebijakan harus menguntungkan masyarakat dan memudahkan masyarakat. Kebijakan publik sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kebijakan yang bersifat tertulis atau peraturan-peraturan atau pun perundang-undangan dan juga ada kebijakan publik yang tidak tertulis tetapi sudah disepakati, yaitu yang disebut konvensi-konvensi.

Menurut Thomas R Dye (2011,1) disebutkan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, kebijakan publik juga mengatur semua yang ada dimana lembaga administrasi publik mempunyai domain. kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari tetapi digunakan secara bergantian dengan aktivitas atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan tujuan, program, keputusan, standar, dan proyek besar. Kebijakan publik dalam konteks ini dipahami dan ditempatkan dalam konteks kebijakan sebagai keputusan. Akan tetapi keputusan-keputusan yang berbentuk kebijakan publik tidak seperti keputusan-keputusan umum, sebagaimana didefinisikan di atas, ketertiban umum lebih tepatnya merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahapan-tahapan sistematis, sehingga dapat diterapkan pada suatu keputusan yang utuh (ketertiban umum).

Sedangkan menurut Anderson, kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk ditentukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor untuk mengatasi suatu masalah atau masalah konsep kebijakan publik Anderson dapat digambarkan sebagai berikut: kebijakan publik tidak lebih dari akumulasi beberapa nilai yang ditentukan dari salah satu nilai terbaik dengan pertimbangan sistematis dan seharusnya menyelesaikan masalah pada masalah publik.

Dalam kebijakan publik ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika ingin membuat kebijakan publik, menurut William Dunn dalam buku Budi Winarno (2012) ada 5 tahapan dalam penyusunan kebijakan publik yaitu, tahapan menyusun agenda dimana pada fase ini para pembuat kebijakan menentukan masalah dan membahas masalah tersebut secara

khusus dan fokus pada masalah utama, tahap kedua adalah formulasi kebijakan yang mana pada fase ini lebih mengkaji lagi masalah serta mencari cara solusi dalam permasalahan tersebut, tahap ke 3 yaitu adopsi kebijakan dimana pada fase ini kebijakan tersebut dikaji dan mencari alternatif kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ditetapkan solusi dan pengesahan kebijakan tersebut, tahap ke 4 adalah tahap implementasi kebijakan, pada fase ini kebijakan dijalankan atau diaplikasikan sesuai hasil dari adopsi kebijakan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan dimana evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap kebijakan apakah kebijakan tersebut sesuai dan berdampak pada permasalahan yang diatasi.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses penyusunan kebijakan publik ada yang dinamakan tahapan implementasi kebijakan publik dimana implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan sumber yang dimaksud dengan sumber yaitu manusia, dana, kemampuan organisasional yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, ada 2 langkah dalam melaksanakan yaitu dengan langsung mengimplementasikannya dengan bentuk program program dan juga bisa melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Jones dikutip dari Widodo (2010) implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah akan tetapi menuntut beberapa syarat antara lain adanya orang atau implementor, sumber daya dan juga dan kemampuan organisasional atau sering disebut

resource. Implementasi juga merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Sedangkan menurut Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2010) lebih menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu dan maupun kelompok swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya dan mentransformasi keputusan-keputusan dalam pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan besar ataupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan tertentu.

Menurut Mazmanian dan Sabatier di kutip dari Widodo (2010) Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program berlaku dan dirumuskan juga mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi juga menekankan pada tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan ketaatan pada diri pada kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan politik, ekonomi dan secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi tindakan pada aktor dan berdampak pada yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier di kutip dari Widodo (2010) Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program berlaku dan dirumuskan juga mencakup usaha-usaha

untuk mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian. Implementasi juga menekankan pada tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan ketaatan pada diri pada kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan politik, ekonomi dan secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi tindakan pada aktor dan berdampak pada yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Dari semua pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang tugasnya menjalankan kebijakan yang telah dibuat atau disetujui sebelumnya dengan menggunakan beberapa sumber daya seperti manusia sebagai pelaksana atau implementor, uang atau dana sebagai biaya operasional dan juga organisasional sebagai wadah dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa model yang dibuat oleh para ahli untuk mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan publik, model model implementasi tersebut antara lain :

- a. Model George Edward III dalam Nugroho (2015) untuk mencapai atau menjalankan model implementasi ini ada 4 variabel yaitu
 - 1.) Faktor Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan

sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat.

2.) Faktor Sumber Daya

Faktor Sumber daya atau resources berkenaan dengan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana dalam hal ini berkaitan dengan kecakapan dari pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Sumberdaya meliputi sumber daya manusia yang harus dan cakup, sumberdaya yang mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, serta sumberdaya informasi dan kewenangan yaitu sumberdaya ini sangat penting dan meliputi sumber yang relevan.

3.) Disposisi

Disposisi atau (disposition) adalah kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan atau keahlian saja tidak cukup harus ada kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi juga merupakan kemauan, keinginan, kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan tersebut dapat terwujud.

4.) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mencakup aspek- aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit unit organisasi dengan organisasi yang ada di luar

b. Charles O. Jones

Model Charles O. Jones (dalam Widodo, 2010) menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang haru dilakukan adalah :

1) Tahapan Organisasi

Tahap organisasi merupakan sebuah upaya untuk menata atau mengatur kembali hal hal seperti sumberdaya, unit-unit hingga metode yang mengarah kepada upaya untuk mewujudkan atau merealisasikan kebijakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta memberikan dampak atau hasil yang diinginkan.

2) Tahapan Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjelasan atau penjabaran dari kebijakan yang telah disusun dan akan dilaksanakan dan masih bersifat abstrak dan dijabarkan di dalam kebijakan teknis operasional. Ada nya tahapan interpretasi dimaksudkan agar memudahkan pemahaman terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan atau dalam pelaksanaan kebijakan.

Pada tahap interpretasi juga mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat untuk menangani permasalahan kepada masyarakat atau sasaran kebijakan lainnya, hal ini bertujuan agar sasaran kebijakan tersebut bisa mengetahui kebijakannya dan diharapkan bisa membantu ataupun mendukung untuk pengmipelemntasian kebijakan.

3) Tahap Aplikasi

Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan atau pengaplikasian kebijakan yang sudah rencanakan dan sudah di sahkan, aktivitas aplikasi dalam penyediaan pelayanan secara rutin pembayaran atau lainnya.

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang di kembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul

A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melakukan keputusan kebijakan, model ini didasarkan oleh beberapa variabel yaitu :

1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan
2. Variabel Intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuannya
3. Variabel Dependen, yaitu tahapan-tahapan dalam proses implementasi
- 4.

d. Model Merilee S. Grindle

Model ini ditentukan oleh Isi Kebijakan dan Konteks Implementasinya, yang mana ide dasarnya setelah kebijakan

ditransformasikan maka implementasi kebijakan pun dilakukan, dalam hal ini keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
 2. Jenis manfaat yang dihasilkan
 3. Derajat perubahan yang diinginkan
 4. Kedudukan pembuat kebijakan
 5. Siapa pelaksana program
 6. Sumber daya yang dikerahkan
- Sementara itu konteks implementasinya adalah :
- 1) Kekuasaan,kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
 - 2) Karakter lembaga dan penguasa
 - 3) Kepatuhan dan daya tanggap

2.2 Teori

Peneliti menggunakan model implementasi yang dicetus oleh Van Horn dan Van Meter yang dimana hal ini berhubungan dengan pelaksanaan Implementasi Peraturan Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam leo agustino (2020) model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Adapun variabel yang mempengaruhi kebijakan ini adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka

akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

4. Komunikasi antar organisasi

terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus

konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam model ini implementasi merupakan abstraksi atau implementasi sebagian dari kebijakan yang pada hakikatnya sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan antar variabel yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Peneliti menggunakan teori Van Horn dan Van Meter sebagai pisau bedah analisis untuk skripsi ini, teori ini dipilih karena cocok untuk mengkaji bagaimana kebijakan dijalankan dan untuk membedah permasalahan dan mencari tahu apa yang menjadi Faktor penghambat dalam berjalannya Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perlindungan anak Perlindungan Anak Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas yang mana Peneliti mengkaji tentang permasalahan kekerasan seksual yang

sangat tinggi di kabupaten sambas walaupun sudah dibuat peraturan

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan rujukan kepada Penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penelitian yang telah dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan dari Penelitian ini berasal dari 2 skripsi yang berbeda. Penelitian yang relevan tersebut di lampirkan sebagai berikut

- 1.) IMPLEMENTASI PERAN DP3AP2KB PROVINSI NTB DALAM MENCEGAH KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DEWASA. Skripsi ini ditulis oleh YULIANI SOPIANTI pada tahun 2021 sebagai syarat sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram .Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi peran DP3AP2KB provinsi NTB dalam mencegah kasus kekerasan perempuan dewasa. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Jumlah informan dalam Penelitian sebanyak 3 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB provinsi NTB dalam pengimplementasiannya atau menjalankan cukup efektif. Dilihat dari indikator-indikatornya. Indikator kepentingan yang mempengaruhi yaitu pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan perempuan karena perempuan adalah pilar Negara yang akan

melahirkan generasi penerus . selanjutnya ditinjau dari segi manfaat pelaksanaannya yaitu apabila berhasil dalam membantu maka pelaksanaan programnya berjalan sesuai rencana dan visi misi bisa terlaksana atau dijalankan sesuai target. Kemudian derajat perubahan yang diharapkan, disini DP3AP2KB provinsi NTB banyak mengharapkan perempuan-perempuan di luar sana berani untuk menyampaikan atau melaporkan kasusnya sehingga dapat ditangani dan diproses. Disini dalam pengambilan keputusannya pemerintah tidak turun langsung dalam mencegah kasus kekerasan, melainkan memandatkan langsung kepada DP3AP2KB Provinsi NTB.

Dengan dipaparkan Penelitian diatas dapat diketahui jika persamaan skripsi tersebut dengan Penelitian Peneliti adalah pada ruang lingkup nya yaitu sama sama pada tingkat kecamatan walaupun berbeda tempatnya, yang kedua adalah tentang tujuannya dari Penelitian ini yaitu sama sama mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan di masing masing daerah sedangkan perbedaannya ada pada tempat atau lokasi Penelitian dimana skripsi ini bertempat di Mataram sedangkan Penelitian Peneliti bertempat di Kabupaten Sambas. Perbedaan lainya adalah penggunaan teori implementasi kebijakan di mana pada skripsi data menggunakan teori Edward III dan Penelitian Peneliti menggunakan Teori Charles O. Jones sebagai pisau bedah analisis.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan alur pikir Peneliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada Penelitian ini Peneliti mengangkat permasalahan tentang tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas dan di berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak yang mana peraturan daerah dimaksudkan untuk dijadikan landasan hukum yang baik agar dapat mencegah semakin banyaknya kasus. Untuk itulah harus ada implementasi terhadap peraturan, berdasarkan fakta di lapangan masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat, ini menandakan jika implementasi kebijakan ini kurang berjalan dengan efektif dan program- program dijalankan dengan kurang optimal.

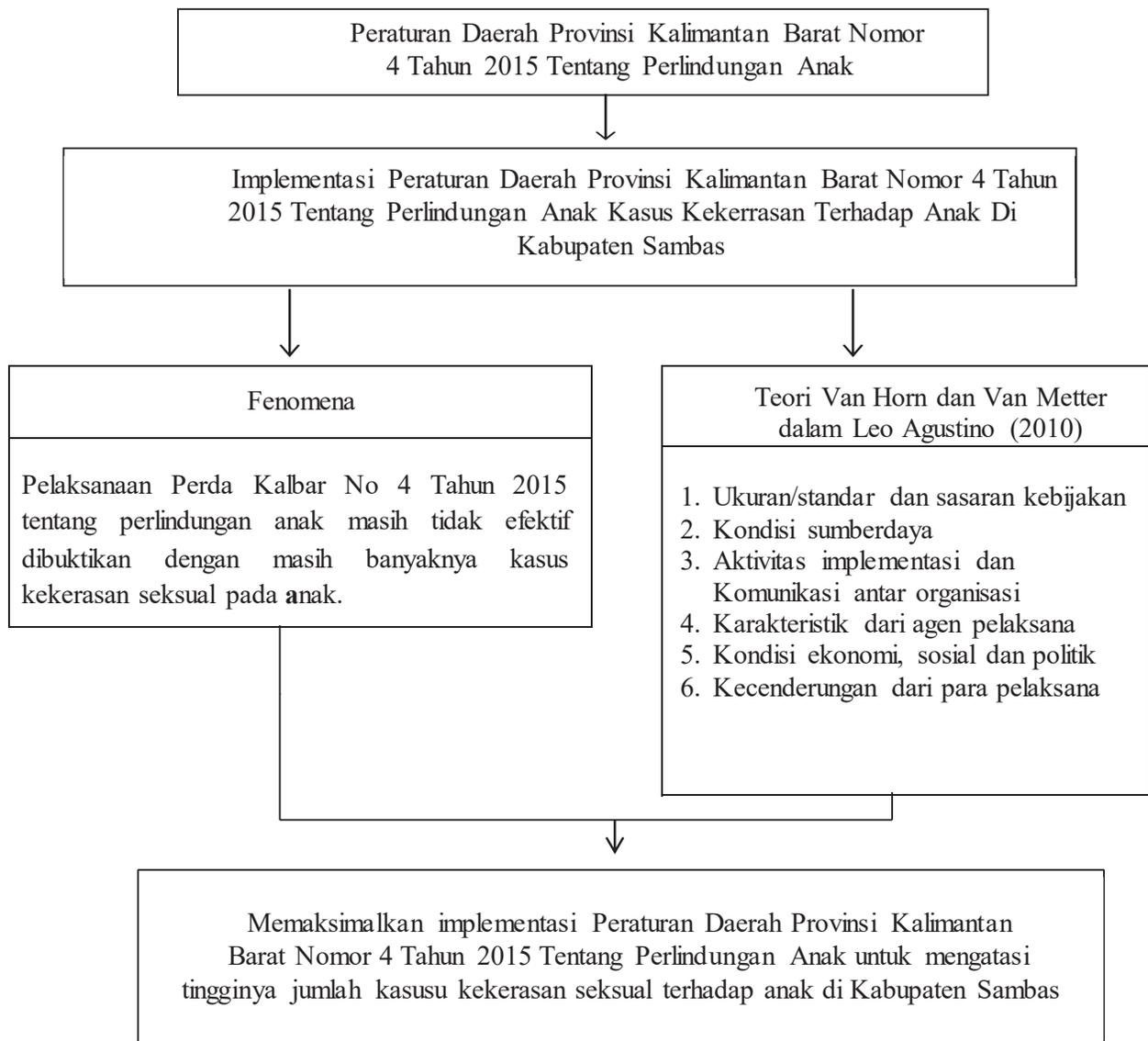
Masih banyaknya kasus kekerasan seksual ini membuat kebijakan yang dibuat tersebut kurang begitu direalisasikan dan tidak sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut, maka untuk mengkaji masalah tersebut Peneliti menggunakan teori Van Horn dan Van Meter yang dimana ada beberapa aspek yang mempengaruhi hasil implementasinya yaitu :

1. Ukuran/standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
4. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
5. komunikasi antar organisasi
6. Kecenderungan(*disposition*) dari Pelaksana/implementor

Dengan adanya Penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait proses terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak , agar peraturan yang dibuat dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang dilandasi oleh kajian teoritis dan sebagaimana yang dipaparkan, maka pertanyaan Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

- 1.) Bagaimana standar/ukuran dan sasaran kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?
- 2.) Bagaimana kondisi sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?
- 3.) Bagaimana karakteristik pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?
- 4.) Bagaimana kecenderungan atau sikap dari pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?

- 5.) Bagaimana komunikasi antar organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?

- 6.) Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sambas ?